

**PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN PENERAPAN
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA
PEMERINTAH DESA
(Studi Survei Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjaran)**

Djodi Setiawan

email : djodisetiawan130671@gmail.com

Muhammad Iqbal

email : balliq85@gmail.com

Salsabillah Diani

email : dianisalsabillah24@gmail.com

Fakultas Ekonomi Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Penerapan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Desa studi survey pada Pemerintah Desa di Kecamatan Banjaran. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan 44 kuesioner kepada 11 Desa di Kecamatan Banjaran. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengelolaan alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,941 > 2,020$) dengan signifikansi $0,000$ lebih kecil dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan terdapat pengaruh yang signifikan antara pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah desa ini dibuktikan dengan hasil uji t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,278 > 2,020$) dengan signifikansi $0,000$ lebih kecil dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$). Kemudian secara simultan pengelolaan alokasi dana desa dan penerapan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Adapun hasil koefisien determinasi sebesar $55,6\%$ sedangkan sisanya sebesar $44,4\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Penerapan Pengendalian Internal, Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

I. PENDAHULUAN

Keseriusan Pemerintah Indonesia memajukan Desa terlihat dari adanya bantuan Dana Desa yang ditingkatkan setiap tahunnya. Pelaksanaan otonomi daerah di tingkat terkecil di Indonesia adalah Desa. Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Menurut Sulimin (2015:42) otonomi Desa merupakan kewenangan bagi Desa dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa yang ada. Dengan adanya otonomi Desa memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa dan dapat mengurangi permasalahan seperti

Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Penerapan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan | Djodi Setiawan, Muhammad Iqbal, Salsabilah Diani

kesenjangan antar wilayah, kemiskinan serta masalah sosial budaya lain dapat diminimalisir. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut salah satu upaya dari pemerintah adalah dengan pemberian Alokasi Dana Desa yang di ambil dari APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10% yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat secara mandiri.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Pagu Dana Desa Tahun 2021 sebesar 72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sedangkan Pagu Dana Desa pada Tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun dan di alokasikan kepada 74,961 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar 4 triliun dibandingkan tahun 2021.

Tujuan pemerintah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam hal pembiayaan program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota dalam APBD Kabupaten/ Kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus. Sedangkan menurut Sanusi dan Djumlani (2019:41) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang berasal dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat dan menurut Syachbarani (2012:2) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang didapatkan melalui Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Hasil Pajak Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten atau kota yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk diberikan kepada desa nilai paling sedikit adalah 10%. Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan Dana yang diperoleh oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur Alokasi Dana Desa di wilayahnya sebagai wujud dari Desentralisasi pengelolaan keuangan.

2.1.2 Pengertian Penerapan Pengendalian Internal.

Menurut Hery (2016:159) Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Menurut IAPI dalam Thorman Lumbanraja, Pengendalian Intern

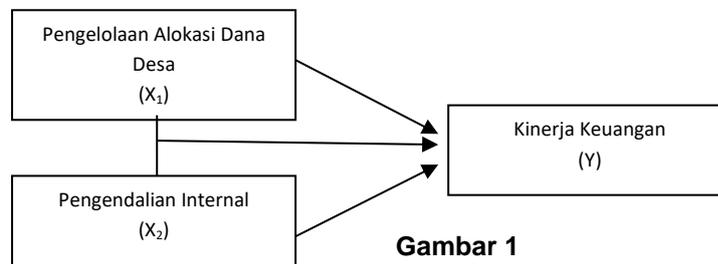
adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan seperti keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dan menurut Wakhjudi (2011:319) Pengendalian Internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan. Jadi dari beberapa Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah sebuah aturan yang harus dipatuhi baik oleh organisasi perusahaan ataupun sektor publik untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.3 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2018:142) Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Sedangkan menurut Isna dan Ayu (2015:78) Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik agar dapat memperhatikan efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Menurut Sanjaya Surya (2018:279) Kinerja keuangan adalah tingkat kesuksesan yang dicapai oleh perusahaan sehingga memperoleh hasil pengelolaan keuangan yang baik. Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan kinerja keuangan merupakan bentuk prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam mengelola keuangan dan juga menggambarkan kondisi kinerja suatu entitas.

2.2 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Penerapan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dapat digambarkan skema paradigam penelitian sebagai berikut :



Gambar 1
Bagian Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Banjaran.
2. Penerapan Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Banjaran.
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Penerapan Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Banjaran.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Penerapan Pengendalian Internal dan Kinerja Keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Banjaran.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verivikatif yaitu untuk untuk mengetahui perkembangan serta pengaruh X_1, X_2 terhadap Y baik secara parsial maupun simultan.

3.2.1 Populasi dan Sampel

3.2.1.1 Populasi

Menurut Sugiono (2017:80) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari atas : objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu pegawai Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

3.2.1.2 Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling* yaitu suatu metode teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yang dianggap sesuai untuk dijadikan data penelitian. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 orang responden, adapun criteria dalam pengambilan sampel yaitu :

1. Aparatur pemerintah desa yang menduduki jabatan seperti Kepala Desa, Sekertaris dan kaur.
2. Minimal 2 tahun masa kerja pada Pemerintah Desa di Kecamatan Banjaran
3. Satuan kerja dalam pemerintah yang mengetahui secara langsung kemudian turut serta dalam pengelolaan dana desa.

3.2.2 Uji Validitas dan Realibilitas

3.2.2.1 Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan menggunakan alat ukur yang digunakan (kuesioner). Pengujian validitas ini dilakukan dengan n dengan menggunakan program SPSS versi 20 dengan criteria sebagai berikut :

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.
3. Nilai r_{hitung} dapat dilihat pada kolom *corrected item total correlation*.

3.2.2.2 Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji realibilitas ini dilakukan pada responden sebanyak 44 pegawai di Pemerintahan setiap Desa di Kecamatan Paseh, dengan menggunakan pernyataan yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas dan akan mentukan realibilitasnya. Menggunakan program SPSS versi 20, variabel dinyatakan realibel dengan criteria berikut :

1. Jika r -alpha positif dan lebih besar dari r -tabel maka pernyataan tersebut *reliabel*.
2. Jika r -alpha negatif dan lebih kecil dari r -tabel maka pernyataan tersebut tidak *reliabel*.
 - a. Jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ maka *reliable*
 - b. Jika nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,6$ maka tidak *reliable*

Variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ dari 0,6.

3.2.2.3 Method Of Successive Interval (MSI)

Setelah dilakukan uji validitas dan uji realibilitas selanjutnya data ordinal (*likert*) yang telah diperoleh tersebut dikonversi menjadi skala interval dengan *Method Of Successive Interval* (MSI). Menurut Sedamayanti dan Syarifudin Hidayat (2011:55) *Method Of Successive Interval* (MSI) adalah metode penskalaan untuk menaikkan skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval.

Perhitungan tersebut menggunakan bantuan *Additional Instrument(Add-Ins)* pada *Microsoft Excel: add-ins – statistic-successive Interval*.

3.2.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan peneliti, bila peneliti ingin mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti. Hal ini senada dengan pendapat Sugiyono (2017:275) mengemukakan bahwa analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jasi analisis regresi linier ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.

Adapun persamaan regresi untuk dua predicator atau variabel independen adalah:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan

α = Koefisien konstanta

$b_1 X_1$ = Koefisien regresi Alokasi Dana Desa

$b_2 X_2$ = Koefisien regresi Penerapan Pengendalian Internal

Untuk mencari a, b1 dan b2 dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\Sigma Y = an + b_1 \Sigma X_1 + b_2 \Sigma X_2$$

$$\Sigma X_1 Y = a \Sigma X_1 + b_1 \Sigma X_1^2 + b_2 \Sigma X_1 X_2$$

$$\Sigma X_2 Y = a \Sigma X_2 + b_1 \Sigma X_1 X_2 + b_2 \Sigma X_2^2$$

Sumber: Sugiyono (2017:278)

2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Analisis koefisien korelasi meliputi koefisien korelasi parsial dan koefisien korelasi ganda.

3. Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Sumber : Ghozali (2016:98)

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi Ganda

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
2. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

4. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:70) mendefinisikan bahwa : "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan."

Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Penerapan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan | Djodi Setiawan, Muhammad Iqbal, Salsabilah Diani

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini :

a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Untuk mencari nilai t_{hitung} maka pengujian tingkat signifikansinya adalah dengan menggunakan rumus yang dikemukakan menurut Sugiyono (2012:237) dalam bukunya yang berjudul Statistika Untuk Penelitian, adalah sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{rP\sqrt{n-3}}{\sqrt{1-rP^2}}$$

Sumber: Sugiono (2012:237)

Keterangan :

rp= Korelasi Parsial

n= Banyaknya sampel

Setelah menghitung nilai t_{hitung} selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} dengan ketentuan uji sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $t_{hitung} > -t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai sig $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah kejelasan sasaran anggaran dan solvabilitas bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Menurut Sugiyono, F_{hitung} dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Sumber : Sujarweni (2015:163)

Keterangan :

R^2 = Koefisien korelasi ganda

k = jumlah variabel independen

n = jumlah anggota sampel

dk = (n-k-1) derajat kebebasan

Setelah menghitung nilai F_{hitung} selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara F_{hitung} dan F_{tabel} dengan ketentuan uji sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $F_{hitung} < -F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $F_{hitung} > -F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai sig $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a										
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	2.822	4.914		.574	.569					
1 Alokasi Dana Desa	.412	.105	.415	3.941	.000	.504	.524	.410	.975	1.026
Pengendalian Internal	.483	.091	.557	5.278	.000	.622	.636	.549	.975	1.026

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 20

Dari data di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut :

Keterangan:

$$Y = 2,822 + 0,412 X_1 + 0,483 X_2$$

Y = Kinerja Keuangan

X₁ = Alokasi Dana Desa

X₂ = Pengendalian Internal

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 2,822
Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen ditiadakan atau Alokasi Dana Desa (X₁) dan Pengendalian Internal (X₂) nilainya 0, maka Kualitas Kinerja Keuangan (Y) adalah 2,822
- Koefisien regresi Kompetensi Alokasi Dana Desa (X₁) sebesar 0,412
Koefisien regresi (b₁) tersebut hasilnya positif. Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel Alokasi Dana Desa (X₁) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Kinerja Keuangan sebesar 0,412 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).
- Koefisien regresi Pengendalian Internal (X₂) sebesar 0,483
Koefisien regresi (b₂) tersebut hasilnya positif. Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel Pengawasan Internal (X₂) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,483 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

4.1.2 Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 2
Hasil Uji Korelasi Pearson
Correlations

		Alokasi Dana Desa	Pengendalian Internal	Kinerja Keuangan
X1	Pearson Correlation	1	.158	.504**
	Sig. (2-tailed)		.304	.000
	N	44	44	44
X2	Pearson Correlation	.158	1	.622**
	Sig. (2-tailed)	.304		.000
	N	44	44	44
Y	Pearson Correlation	.504**	.622**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	44	44	44

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan Data dengan SPSS Versi 20

Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Penerapan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan | Djodi Setiawan, Muhammad Iqbal, Salsabilah Diani

Tabel 3
Hasil Uji Korelasi Secara Simultan (R)
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.745 ^a	.556	.534	4.782017	2.350

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS Versi 20

Dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi di atas, menunjukkan bahwa :

- Korelasi antara Alokasi Dana Desa (X_1) dengan Kinerja Keuangan (Y) adalah sebesar 0,504. Berdasarkan tabel kriteria korelasi termasuk pada nilai korelasi antara 0,40 – 0,599 mempunyai hubungan yang sedang. Karena hasilnya positif maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Alokasi Dana Desa (X_1) akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Keuangan.
- Korelasi antara Pengendalian Internal (X_2), dengan Kualitas Laporan Keuangan (Y) adalah sebesar 0,622 Berdasarkan tabel kriteria korelasi termasuk pada nilai korelasi antara 0,60 – 0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pengendalian Internal (X_2) akan diikuti oleh Kenaikan Kinerja Keuangan.
- Korelasi antara Alokasi Dana Desa (X_1) , dengan Pengendalian Internal (X_2) adalah sebesar 0,304 Berdasarkan tabel kriteria korelasi termasuk pada nilai korelasi antara 0,20 – 0,399 mempunyai hubungan yang sangat rendah. Karena hasilnya positif maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Alokasi Dana Desa (X_1) akan diikuti oleh Kenaikan Pengendalian Internal (X_2).

4.1.3 Koefisien Determinasi

Tabel 4
Hasil Uji Korelasi secara Simultan (R Square)
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.745 ^a	.556	.534	4.782017	2.350

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS Versi 20

Dari table diatas, diketahui nilai R square sebesar 0,556 Nilai R square menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai KD = 0,556 (55,6%), yang berarti, Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan Desa di kecamatan banjaran dipengaruhi oleh Pengendalian internal dan Kinerja Keuangan sebesar 55,6%.

4.1.4 Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Tabel 5
Hasil Uji t Pengaruh X_1, X_2 Terhadap Y
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	2.822	4.914		.574	.569					
Alokasi Dana Desa	.412	.105	.415	3.941	.000	.504	.524	.410	.975	1.026
Pengendalian Internal	.483	.091	.557	5.278	.000	.622	.636	.549	.975	1.026

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 20

Pada tabel 5 diatas, nilai t_{hitung} untuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X_1) adalah 3,941, pada t_{tabel} dengan dk 41 ($n-3 = 44 -3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,020 (lihat t-tabel pada lampiran). Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,941 > 2,020$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Banjaran.

2. Pengaruh Pengendalian internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Banjaran

Pada tabel 5 di atas, nilai t_{hitung} untuk Pengendalian Internal (X_2) adalah 5,278 pada t_{tabel} dengan dk 41 ($n-3 = 44-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,020 (lihat t-tabel pada lampiran). Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,278 > 2,020$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Banjaran.

3. Pengaruh Secara Simultan Alokasi Dana Desa dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Banjaran

Tabel 6
Hasil uji F Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1172.402	2	586.201	25.634	.000 ^b
	Residual	937.575	41	22.868		
	Total	2109.977	43			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS versi 20

Dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 25,634 sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 41 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,000 sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 3,23. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya kedua variabel dependen yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y). Dari tabel ANOVA^a di atas dapat dilihat nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Alokasi Dana Desa (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y).

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Desa Kecamatan Banjaran

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X_1) mempunyai pengaruh sebesar (39,4%). Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Keuangan, demikian pula sebaliknya. Kemudian hasil uji-t bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,941 > 2,020$) serta nilai sig. Di atas 0,05 yaitu sebesar 0,000, kemudian pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penolakan H_0 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Keuangan sebagaimana menurut Undang-Undang No 06 tahun 2014 Pasal 7 ayat 4 tentang Pemerintahan Desa, alokasi dana desa merupakan alokasi dana yang diperuntukkan untuk desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus yang bertujuan untuk

Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Penerapan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan | Djodi Setiawan, Muhammad Iqbal, Salsabilah Diani

pemerataan kemampuan keuangan Desa, mendanai kebutuhan Desa serta pelayanan masyarakat. Pengaruh pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa secara konstan dengan penelitian yang dilakukan oleh Claudia Marianti Dappa. Yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa, sedangkan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan desa, sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan desa.

Dengan demikian hasil penelitian di Pemerintah Desa Kecamatan banjaran bahwa apabila semakin baik Pengelolaan Alokasi Dana Desa maka akan semakin baik Kinerja Keuangan, demikian pula sebaliknya.

2. Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Desa Kecamatan Banjaran

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, Pengendalian Internal (X_2) mempunyai pengaruh langsung sebesar (52,7 %). Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pengendalian Internal akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Keuangan, demikian pula sebaliknya. Kemudian hasil uji-t bahwa Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,278 > 2,020$) serta nilai sig. dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, kemudian pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penolakan H_0 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan sebagaimana menurut tuana kotta bahwa Pengendalian internal merupakan proses, kebijakan, dan prosedur yang didesain manajemen guna memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku. Pengendalian Internal merupakan proses, kebijakan, dan prosedur yang sangat penting bagi kinerja keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian ini secara konstan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiaji, Raka Pratama. Menyatakan bahwa penerapan *Good Governance*, Kapasitas aparatur desa dan pengendalian internal mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan demikian hasil penelitian di Pemerintah Desa Kecamatan Banjaran bahwa apabila semakin baik Pengendalian Internal maka akan semakin baik Kinerja Keuangan, demikian pula sebaliknya.

3. Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Penerapan Pengendalian Internal secara Simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Banjaran

Berdasarkan hasil perhitungan Koefisien determinasi (R kuadrat) yang dinyatakan dalam persentase menggambarkan besarnya kontribusi semua variabel bebas Alokasi Dana Desa (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2) Kinerja Keuangan (Y) adalah sebesar (55,6%). Selanjutnya hasil uji-F menunjukkan bahwa secara simultan Alokasi Dana Desa dan Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($25,634 > 3,23$) serta nilai sig. Di atas 0,05 yaitu sebesar 0,000, kemudian pada gambar kurva uji Fihak kanan bahwa F_{hitung} berada pada daerah penolakan, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Alokasi Dana Desa (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y).

Alokasi Dana Desa dan Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, peneliti dapat memahami bahwa secara bersama-sama apabila Alokasi Dana Desa dan Pengendalian Internal diterapkan serta dilaksanakan secara tepat maka akan menentukan Kinerja Keuangan semakin baik pada Pemerintah Desa Kecamatan Banjaran. Hal ini peneliti sampai ke pemahaman bahwa secara realita kedua variabel ini masing-masing memiliki kontribusi dan apabila secara bersama-sama Alokasi Dana Desa dan Pengendalian Internal dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan Kinerja Keuangan.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pemaparan yang telah peneliti bahas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa memberikan Pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Banjaran . Dengan demikian Pengelolaan Alokasi Dana Desa memberikan kontribusi positif yang dapat menentukan kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Banjaran, artinya semakin baik Pengelolaan Alokasi Dana Desa maka akan semakin baik Kinerja Keuangan pemerintah Desa demikian sebaliknya.
2. Penerapan Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Banjaran, dengan demikian Penerapan Pengendalian Internal memberikan kontribusi positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Banjaran, artinya semakin baik penerapan pengendalian internal maka akan semakin baik juga kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Banjaran dan sebaliknya.
3. Secara simultan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Penerapan Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Banjaran, yaitu hasil Uji- F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} serta berada pada daerah penolakan H_0 , sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian total pengaruh ditunjukkan oleh hasil Koefisien Determinasi (KD) memiliki pengaruh yang cukup kuat.

5.2 Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa belum optimal yaitu mengenai peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum terlaksanakan dengan baik. Dengan demikian penulis menyarankan agar pemerintah desa kecamatan banjaran agar lebih tegas menerapkan sanksi atau teguran bagi pegawai yang tidak mematuhi peraturan desa dengan cara menerapkan memberikan surat peringatan bagi pegawai yang tidak mematuhi peraturan desa.
2. Pengendalian internal belum optimal dalam mengadakan rotasi staff sebagai langkah untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian penulis menyarankan agar pemerintah desa kecamatan banjaran sebaiknya agar mengadakan staff rotasi dengan tujuan agar mengurangi monoton kerja, perencanaan suksesi, menciptakan kesesuaian pekerjaan dengan pegawai yang tepat, menguji keterampilan dan kompetensi pegawai, mengembangkan rangkaian pengalaman kerja yang lebih luas dengan cara melakukan tes atau ujian seperti pada awal perekrutan pegawai desa, melakukan training bila diperlukan sehingga pegawai dapat dengan mudah dan cepat beradaptasi dengan lingkungan pekerjaannya yang baru.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Desa belum optimal salah satunya masyarakat belum merasakan langsung manfaat dari program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, dengan demikian penulis menyarankan agar perangkat desa melakukan sosialisasi yang massif dengan melibatkan kalangan masyarakat, rt dan rw dalam menyusun anggaran desa dengan memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan pelaksanaan keuangan desa dengan cara membuat spanduk realisasi anggaran desa di balai RW agar diketahui ketepatan dan akuntabilitas rencana anggaran desa oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Fahmi, Irham. 2017. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.

Hery. 2016. Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive *Edition*. Jakarta: Grasindo.

Sugiyono. 2017. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Syachbarani. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Yogyakarta

Wakhyudi. 2018. Soft Controls Aspek Humanisme Dalam Sistem Pengendalian Intern. Diandra Kreatif.

Sanusi, & Djumlani. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa di Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju. *e journal katalogis*. 2019.

Undang – Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa: <https://www.dpr.go.id/>